BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diberikan otoritas untuk mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing dengan intervensi minimal dari pemerintah pusat. Implementasi kebijakan desentralisasi ini dimaksudkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi regional, meningkatkan efektivitas dan responsivitas pelayanan publik sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah, serta memitigasi kesenjangan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah yang telah berlangsung selama ini.

Implementasi desentralisasi fiskal diproyeksikan dapat memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Dalam konteks desentralisasi fiskal, optimalisasi pelayanan di berbagai sektor, khususnya sektor publik, menjadi fokus utama. Peningkatan kualitas layanan publik tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi di daerah. Realisasi target ini dapat dicapai melalui inisiatif pemerintah dalam menyediakan berbagai fasilitas penunjang investasi. Konsekuensinya, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih substansial untuk mencapai tujuan tersebut. Alokasi anggaran ini berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan publik terhadap infrastruktur dan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah (Kartika & Djarad, 2021).

Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur sumber daya yang ada, mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi daerah yang diarahkan untuk mempercepat tercapainya pertumbuhan ekonomi hingga terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta semua masyarakat untuk kemajuan dan kemakmuran bersama. Pada tahap implementasi otonomi diperlukan dana yang besar. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan n sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Salah satu endapatan daerah yang tercermin dalam APBD adalah Pendapatan Asli PAD).

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Secara teoritis pengukuran kemandirian daerah diukur dari PAD yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Melalui PAD daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah daerah bersangkutan. Masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi penerimaan daerah yang sangat akurat sehingga belum dapat dipungut secara optimal (Saraswati 2017).

Kemampuan ekonomi individu suatu daerah diperkirakan menjadi salah satu faktor penerimaan pendapatan asli daerah. Kemampuan ekonomi ini dapat diukur menggunakan PDRB Per Kapita di daerah tersebut dimana angka laju pertumbuhannya berfluktuatif setiap tahunnya, sejalan dengan laju pertumbuhan pendapatan asli daerah (Muhammad 2021). Seperti yang terlihat pada Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 2019-2023 Provinsi Maluku Utara mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 12.3 %. Laju pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan peningkatan pendapatan asli daerah.

Tabel 1.1 Data Pertumbuhan Ekonomi Dan PAD
Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	PAD
1.	2019	6.25 %	433.448.363.470
2.	2020	5.39%	447.291.483.047
3.	2021	16.79%	552.347.164.463
4.	2022	22.94%	779.231.797.126
5.	2023	20.49%	1.053.227.132.360

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB Provinsi Maluku Utara Tahun Dan Ditjen Kementrian Keuangan Tahun 2019-2023

Peningkatan pelayan di berbagai sektor dalam era desentralisasi fiskal sangat diharapkan terutama pada sektor publik. Peningkatan layanan di harapkan dapat meningkatkan daya tarik investor untuk membuka daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi (Kartika dan Djarad 2021). Salah satu syarat agar perekonomian mampu mencapai kemajuan ialah dengan adanya investasi (Zakaria, 2019). semakin meningkatnya nilai investasi, maka akan menyebabkan meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD). Meningkatnya investasi pada suatu daerah dapat mengakibatkan meningkatnya pajak yang diterima oleh daerah tersebut. Penerimaan pajak yang semakin meningkat juga berdampak pada semakin meningkatnya kemampuan suatu daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri. Peningkatan pendapatan melalui penerimaan pajak selanjutnya dapat membuat PAD daerah tersebut semakin meningkat pula (Pratiwi 2023). Pendapat ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tianto (2022) yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Penelitian ini menyatakan pula bahwa apabila Pemerintah ingin meningkatkan PAD pada daerahnya, maka Pemerintah harus memperhatikan investasi yang masuk.

Selain investasi, tenaga kerja merupakan faktor penting yang mempengaruhi output suatu daerah. Menurut UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1, tenaga kerja adalah setiap individu yang baik di dalam maupun di luar hubungan kerja mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemampuan sektor tradisional dalam menyerap kelebihan tenaga kerja pada sektor industri/modern, dapat meningkatkan standar upah di pedesaan yang selanjutnya turut mempersempit kesenjangan tingkat pendapatan pedesaan dan perkotaan. Sebaliknya kelebihan tenaga kerja dapat dipandang sebagai sumber pendapatan, ketika distribusi tenaga kerja pada sektor tradisional maupun modern berjalan dengan efektif. (Andriansyah et al 2024).

Malik (2018) memaparkan bahwa perkembangan struktur sosial, ekonomi dan demografis berpengaruh pada output dan produktivitas tenaga kerja. Dalam aspek ketenagakerjaan ini, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hal yang sangat krusial untuk diberi atensi demi peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor ekonomi.

ı tenaga kerja dapat terlihat ketika tenaga kerja sebagai input luksi output berupa barang dan jasa. Selain itu, tenaga kerja memiliki ; untuk memperoleh pendapatan yang kemudian akan digunakan untuk membeli barang dan jasa (Andriansya et al 2024). Hasil dari

Optimized using
trial version
www.balesio.com

penelitian Siwi et al. (2021) menunjukkan bahwa pada setiap peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 1%, akan terjadi peningkatan PAD sebesar 0,43%. Semakin produktif tenaga kerja, pendapatan akan turut meningkat sehingga berdampak pada produksi perusahaan dan tingkat konsumsi tenaga kerja. Oleh karena itu, tenaga kerja dinilai sebagai sumber daya potensial yang menjadi penggerak dalam pembangunan daerah dan peningkatan PAD.

Indikator pertumbuhan ekonomi regional juga dipengaruhi oleh peran pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. Pengeluaran pemerintah daerah diukur berdasarkan total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang bersifat produktif, semakin tinggi tingkat perekonomian suatu daerah (Wibisono, 2003 dalam Pradana,2018).

Belanja daerah yang terdiri dari belanja modal butuh waktu dalam prosesnya yang mana mulai dari penganggaran, kemudian pelaksanaan, baru digunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Peningkatan belanja daerah akan membuat peningkatan terhadap pendapatan asli daerah, karena pemerintah dapat memungut pajak dan retribusi atas pembangunan infrastruktur yang telah mereka bangun untuk publik. Penemuan ini konsisten dengan temuan empiris yang dilaporkan oleh Imran Tajuddin et al (2024) yang juga menyatakan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Belanja modal tidak langsung untuk pembangunan yang dapat digunakan untuk masyarakat dalam perekonomian, tidak langsung dibangun sarana dan prasarana sehingga butuh waktu untuk dapat digunakan (Rahman 2024).

Selama periode 2019-2023, data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara meningkat secara signifikan. Peningkatan ini diiringi oleh bertambahnya jumlah investasi dan tenaga kerja, yang sebagian besar dipengaruhi oleh belanja modal pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dengan tujuan menarik investor. Namun, pertumbuhan ekonomi yang signifikan ini tidak diikuti oleh peningkatan tan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Maluku Utara. Hal ini terbukti dari data com yang menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Provinsi Maluku Utara dalam daftar provinsi dengan PAD terendah meskipun pertumbuhan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ekonomi mencapai 22,94%, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa ada aspek yang memerlukan perhatian khusus terkait kinerja pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh investasi, tenaga kerja, dan belanja daerah terhadap PAD, dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan variabel PAD dan belanja daerah. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah investasi, tenaga kerja, dan belanja daerah, sementara variabel dependen adalah PAD dan variabel intervening adalah pertumbuhan ekonomi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Apakah investasi berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi ?
2. Apakah tenaga kerja berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi ?
3. Apakah belanja daerah berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi ?
4. Apakah investasi berpengaruh langsung terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) ?
5. Apakah tenaga kerja berpengaruh langsung terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) ?
6. Apakah belanja daerah berpengaruh langsung terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) ?
7. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh langsung terhadap pendapatan asli daerah (PAD) ?
8. ıkah investasi berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli rah (PAD) baik secara langsung maupun tidak langsung melalui :umbuhan ekonomi ?

Optimized using
trial version
www.balesio.com

9. Apakah tenaga kerja berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi ?
10. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh langsung Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk menganalisis pengaruh langsung tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Untuk menganalisis pengaruh langsung belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Untuk menganalisis pengaruh langsung Investasi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).
5. Untuk menganalisis pengaruh langsung tenaga kerja terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).
6. Untuk menganalisis pengaruh langsung belanja daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).
7. Untuk menganalisis pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah.
8. Untuk menganalisis pengaruh investasi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi.
9. Untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi.

uk menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap penerimaan dapatan asli daerah (PAD) baik secara langsung maupun tidak gsung melalui pertumbuhan ekonomi.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta menjadi referensi yang relevan dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut khususnya dalam keuangan daerah yang berkaitan dengan kinerja pemerintah.

b. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah daerah dan dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk peningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori Dan Konsep

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Endogen

Teori pertumbuhan endogen yang dipelopori oleh Romer (1986) dan Lucas (1988) merupakan awal kebangkitan dari pemahaman baru mengenai faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Hal ini seiring dengan perkembangan dunia yang ditandai oleh perkembangan teknologi modern yang digunakan dalam proses produksi. Sehingga permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi tidak bisa dijelaskan secara baik oleh teori Neoklasik, seperti penjelasan mengenai decreasing return to capital, persaingan sempurna dan eksogenitas teknologi dalam model pertumbuhan ekonomi.Teori Pertumbuhan endogen merupakan suatu teori pertumbuhan yang menjelaskan bahwa pertumbuhan dalam jangka panjang ditentukan dari dalam model dari pada oleh beberapa variabel pertumbuhan yang dianggap eksogen.

b. Teori Harrod-domar

Dalam menganalisis tentang pertumbuhan ekonomi, teori Harrod Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau steady state dalam jangka panjang. Analisis Harrod dan Domar menggunakan asumsi sebagai berikut :1). Barang modal telah mencapai kapasitas penuh (full employment), 2). Tabungan adalah proporsional terhadap pendapatan. 3). Rasio antara modal dan produksi (capital output ratio) adalah tetap. 4). Perekonomian adalah terdiri dari dua sektor.

Analisis yang dilakukan oelh Harrod dan Domar merupakan pelengkap dari analisis yang dilakukan oleh Keynesian. Dalam analisis yang dilakukan Keynesian adalah persoalan ekonomi jangka pendek, sedangkan dalam analisis Harrod Domar merupakan analisis ekonomi jangka panjang. Dalam analisis Domar dapat dilihat bahwa:

alam jangka panjang pertambahan pengeluaran aggregate yang erkepanjangan perlu dicapai untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2. Pertumbuhan ekonomi yang teguh hanya mungkin dicapai apabila I + G + (X-M) terus menerus bertambah dengan tingkat yang tinggi.

2.1.1 Investasi

Investasi berasal dari kata "invest" yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, investasi diartikan sebagai segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam konteks ekonomi, investasi merujuk pada pengeluaran yang dilakukan oleh investor atau perusahaan untuk memperoleh barang modal dan perlengkapan produksi dengan tujuan meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Oleh karena itu, investasi sering disebut juga sebagai penanaman modal. Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undagan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih popular dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undanga. Dari pengertian diatas, dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari kegiatan investasi atau penanaman modal, yaitu:

1) Adanya motif untuk meningkatkan atau setidak-tidaknya untuk mempertahankan modal.
2) Modal tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat fisik dan dapat diraba, tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak fisik dan tidak dapat diraba.
3) Investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu investasi asing dan investasi domestik. Investasi asing berasal dari pembiayaan luar negeri, sedangkan investasi domestik adalah investasi yang dibiayai oleh sumber dana dalam negeri.

Setiap upaya penanaman modal harus mengarah pada peningkatan eraan masyarakat. Ini berarti bahwa investasi yang dilakukan oleh para harus berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat a. Investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu investasi asing (PMA) dan domestik (PMDN). Investasi asing berasal dari sumber dana luar

Optimized using
trial version
www.balesio.com

negeri, sementara investasi domestik berasal dari sumber dana dalam negeri. Investasi ini digunakan untuk membangun usaha yang terbuka untuk investasi dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Istilah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berasal dari bahasa inggris, yaitu *domestic investment*. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat ditemukan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanaman Modal Dalam Negeri adalah penggunaan daripada kekayaan seperti terebut dalam pasal 1, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Penggunaan kekayaan secara langsung merujuk pada penggunaan modal yang langsung digunakan oleh investor domestik untuk pengembangan usahanya, sementara penggunaan secara tidak langsung mengacu pada penggunaan modal yang tidak digunakan secara langsung untuk membangun usaha. Pelaksanaan penanaman modal didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modala dalam negeri. Pihak yang dapat menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri adalah:

a) Orang-Perorangan warga Negara Indonesia, dan atau;
b) Badan Usaha Indonesia, dan atau;
c) Badan Hukum Indonesia

Penanaman Modal Dalam Negeri dimulai sejak tahun 1968, sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri hingga saat ini. Undang-undang ini memberikan kesempatan kepada investor domestik untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Kajian tentang perkembangan investasi domestik dapat dibagi menjadi dua era, yaitu Baru dan era Reformasi.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

b. Penanaman Modal Asing (PMA)

Istilah Penanaman Modal Asing merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu foreign investment. Pengertian Penanaman Modal Asing ditemukan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Penanaman Modal Asing adalah hanya meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang dan digunakan untuk menjalankan usaha di Indonesia. Unsur-unsur Penanaman Modal Asing dalam definisi diatas dapat meliputi :

1) Dilakukan secara langsung, artinya investor secara langsung menangggung semua resiko yang akan dialami dari penanaman modal tersebut.
2) Menurut Undang-undang, artinya bahwa modal asing yang di investasikan di Indonesia oleh investor asing harus didasarkan pada subtansi, prosedur, dan syarat-syarat yang telh ditentukan dalam peraaturan Perundang-undangan yang berlakuk dan ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia.
3) Digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, artinya mdal yang ditanamkan oleh investor asing digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia harus berstatus sebagai Badan Hukum.

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanaman Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

Teori Harrod-Domar dalam Sadono (2007) memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan atau jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai n utnuk menghasilkan barang-barang dan atau jasa yang lebih besar.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2.1.2 Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Mulyadi, 2003). Definisi tenaga kerja menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah seluruh penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih yang potensial memproduksi barang dan jasa baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Jadi setiap orang atau penduduk yang sudah berusia 15 tahun keatas, tergolong sebagai tenaga kerja.

Tenaga kerja (man power) terdiri atas dua kelompok yaitu angkatan kerja (labour force) dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (labor force) adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjan. Sedangkan Bukan Angkatan Kerja (unlabour force) adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan, yakni orang-orang yang kegiatanya bersekolah (pelajar/mahasiswa), mengurus rumah tangga (maksudnya ibu-ibu yang bukan wanita karir), serta menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya (Dumairy, 1996).

Tenaga kerja dalam pembangunan nasional merupakan faktor dinamika penting yang menentukan laju pertumbuhan perekonomian baik dalam kedudukannya sebagai tenaga kerja produktif maupun sebagai konsumen. Ketidakseimbangan dalam penyebaran penduduk antar daerah yang menyebabkan tidak proporsionalnya penggunaan tenaga kerja secara regional dan sektoral akan menghambat pula laju pertumbuhan perekonomian nasional (Kusumosuwidho, 1981).

Menurut Irawan dan Suparmoko (2002) yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan penduduk yang belum bekerja, namun siap untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. Kemudian penduduk yang bekerja adalah mereka yang melakukan
n guna menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh penghasilan,
bekerja penuh maupun yang tidak bekerja penuh.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Menurut Mulyadi (2003), teori klasik menganggap bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith (1729-1790) juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (necessary condition) bagi pertumbuhan ekonomi.

2.1.3 Belanja Daerah

Menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Struktur Belanja Daerah terbagi menjadi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Komponen dalam Belanja Langsung adalah Belanja Pegawai Langsung, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Sementara komponen dalam Belanja Tidak Langsung adalah Belanja Pegawai Tidak Langsung, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga.

a. Belanja Modal

Halim (2008) mendefinisikan Belanja Modal sebagai pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengertian tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang menambah inventaris atau aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan riode akuntansi) dan digunakan untuk kepentingan umum. Undang- Nomor 71 Tahun 2010 mendefinisikan Belanja Modal sebagai ran yang dilakukan untuk pembelian, pengadaan, atau pembangunan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Kemudian pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pasal 53 ayat 2 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam Belanja Modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan aset sampai asset tersebut siap digunakan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah yang berasal dari suatu anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya dimana asset tersebut dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja dalam mengemban tugasnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengklasifikasikan Belanja Modal ke dalam lima kategori utama:

1) Belanja Modal Tanah

   Belanja Modal Tanah merujuk pada pengeluaran anggaran atau biaya yang dialokasikan untuk proses perolehan, pembebasan, atau peralihan kepemilikan tanah, termasuk juga pengosongan, pengurungan, perataan, pematangan tanah, penerbitan sertifikat, dan biaya lainnya yang terkait dengan memperoleh hak atas tanah hingga mencapai kondisi siap untuk digunakan.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

   Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran anggaran atau biaya yang dialokasikan untuk pengadaan, penambahan, atau penggantian peralatan dan mesin, serta peningkatan kapasitasnya, beserta inventaris atau aset kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (dua belas bulan), hingga mencapai kondisi siap digunakan.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

   elanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran atau aya yang dialokasikan untuk pengadaan atau penggantian gedung dan angunan, termasuk juga biaya untuk perencanaan, pengawasan, dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pengelolaan pembangunan yang meningkatkan kapasitas, hingga gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

   Belanja Modal untuk jalan, irigasi, dan jaringan merujuk pada pengeluaran atau biaya yang dialokasikan untuk pengadaan, penggantian, penambahan, peningkatan pembangunan atau pembuatan, serta perawatan jalan, irigasi, dan jaringan. Ini juga mencakup pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan yang meningkatkan kapasitas, hingga jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap digunakan.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

   Belanja Modal Fisik lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penggantian, penambahan, peningkatan pembangunan atau pembuatan, serta perawatan terhadap aset fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria Belanja Modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan. Termasuk dalam kategori ini adalah pembelian melalui kontrak sewa beli, barang-barang seni, barang purbakala dan museum, hewan ternak, tanaman, serta buku dan jurnal ilmiah.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan aktivitas dalam perekonomian yang meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi serta kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2000). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi mengukur kinerja perkembangan suatu perekonomian. Dari periode ke periode, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa meningkat. Peningkatan kemampuan ini disebabkan oleh penambahan jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi. Investasi berperan dalam menambah barang modal dan mengembangkan teknologi yang digunakan. Selain itu, tenaga kerja

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ıh seiring dengan perkembangan populasi serta peningkatan pendidikan ·ampilan mereka.

ırut Arsyad (1999), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai tan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Pendapatan Nasional Bruto

(PNB) tanpa memperhatikan apakah peningkatan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah terjadi perubahan dalam struktur ekonomi. Salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur melalui pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB mencerminkan peningkatan output per kapita dalam jangka panjang. Penekanan pada "proses" menunjukkan sifat dinamis, perubahan, atau perkembangan. Oleh karena itu, pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya dilakukan dalam periode waktu tertentu, seperti tahunan. Aspek ini penting untuk dianalisis agar kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektivitasnya.

a. Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik

Dalam teori Solow, Robert. M. Solow menjelaskan bahwa investasi, tabungan, pertumbuhan penduduk, serta tekonologi berpengaruh terhadap tingkat perekonomian dan pertumbuhannya. Solow membangun model pertumbuhan ekonomi yang dibuat oleh Harrod-Domar dengan menghilangkan asumsi yang dianggap meragukan. Walaupun dalam kerangka umum dari model Solow mirip dengan model Harrod-Domar, tetapi model Solow dianggap lebih mudah, karena:

a. Menghindari masalah ketidakstabilan yang merupakan ciri warranted rate of growth dalam model Harrod-Domar
b. Dapat lebih mudah digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah distribusi pendapatan.

   Kemudahan model ini disebabkan karena Solow menggunakan bentuk produksi yang lebih mudal dimanipulasikan secara aljabar. Dalam model Harrod-Domar, output-capital dan output-tenaga kerja masing-masing dihubungkan oleh satu fungsi produksi yang tidak bisa berubah, yaitu $Qp = hK$ dan $Qn = nN$. Dalam model pertumbuhan ekonomi Solow pergunakan suatu fungsi produksi yang bisa menampung berbagai emungkinan subtitusi antara capital (K) dan tenaga kerja (L).

Optimized using
trial version
www.balesio.com

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi Rostow

Rostow dan Musgrave (1960) dalam Guritno Mangkoesobroto (1999) mengaitkan model tahap-tahap pembangunan dengan pengeluaran pemerintah, menyatakan bahwa peran pengeluaran pemerintah dalam pembangunan mulai tergeser oleh investasi sektor swasta. Namun, pada tahap ini, pemerintah tetap memiliki peran signifikan dalam pembangunan. Hal ini disebabkan oleh risiko dominasi sektor swasta yang dapat memunculkan kekuatan monopoli dan kegagalan pasar, sehingga pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih besar. Tahap kedua perkembangan ekonomi ini memperumit hubungan antar sektor. Misalnya, pertumbuhan ekonomi yang dipacu oleh perkembangan sektor industri dapat meningkatkan polusi lingkungan dan risiko eksploitasi buruh. Oleh karena itu, diperlukan campur tangan pemerintah untuk meminimalkan dampak negatif dari kemajuan pembangunan ekonomi.

c. Teori Pertumbuhan Baru *(New Growth Theory)*

Teori pertumbuhan endogen memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi yang bersifat endogen, yaitu berasal dari dalam sistem ekonomi itu sendiri. Teori ini menekankan bahwa pertumbuhan lebih ditentukan oleh sistem produksi internal daripada faktor eksternal. Kemajuan teknologi dianggap sebagai faktor endogen yang muncul dari keputusan ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan.

Akumulasi modal merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi. Definisi modal diperluas untuk mencakup modal pengetahuan dan modal sumber daya manusia. Perubahan teknologi dianggap sebagai bagian integral dari proses pertumbuhan ekonomi dan bukan sebagai faktor eksternal. Dengan demikian, teknologi merupakan hasil dari keputusan ekonomi internal untuk berinvestasi dalam pengetahuan dan pengembangan keterampilan manusia, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (Romer, 1994).

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2016), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan bebatuan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah itu sendiri (Halim & Kusufi, 2014). Sedangkan menurut Mardiasmo (2018), adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari potensi lokal, termasuk sektor pajak, retribusi, atau pendapatan sah lainnya, yang digunakan untuk mendanai dan membangun daerah.

Komposisi Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

a. Pajak Daerah

   Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2014, pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

Optimized using
trial version
www.balesio.com

tentang pajak daerah, sumber pajak daerah mencakup penerimaan dari pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, reklame, dan golongan

c. Jenis Pajak Kabupaten/Kota tidak bersifat limitatif, artinya Kabupaten/Kota diberikan kesempatan untuk menggali potensi sumber keuangan lain selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam UU No. 34 Tahun 2011, dengan menetapkan jenis pajak spesifik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah dapat didefinisikan sebagai pungutan yang dikenakan kepada orang atau badan oleh pemerintah daerah dengan imbalan berupa jasa pelayanan atau perizinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi terletak pada timbal balik langsung: pada pajak, tidak ada timbal balik langsung kepada pembayar pajak, sedangkan pada retribusi, ada timbal balik langsung yang diterima oleh pembayar retribusi. Retribusi daerah dibagi tiga golongan yaitu:

1) Retribusi jasa umum adalah pungutan yang dikenakan oleh daerah kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan, termasuk pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi objek wisata.
2) Retribusi jasa usaha adalah pungutan yang dikenakan oleh daerah berkaitan dengan penyediaan layanan yang belum memadai disediakan oleh pihak swasta atau penyewaan aset/kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan.
3) Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan. Izin ini bertujuan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi (Pasal 18 Ayat 2 UU No. 34 Tahun 2000).

c. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atau badan lain yang merupakan BUMD. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang dirinci menurut objek pendapatan mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, serta bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam kategori Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah antara lain:

1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
2) Penerimaan jasa giro
3) Pendapatan dari pengembalian
4) Fasilitas sosial dan fasilitas umum
5) Pendapatan dari asuransi kesehatan pegawai

Hasil Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, baik secara tunai maupun angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta dari asuransi kesehatan pegawai.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sub-bab ini memuat hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu merujuk pada studi-studi ɛvan baik dari segi subjek penelitian maupun variabel yang diamati tama. Uraian dalam sub-bab ini mencakup perbandingan dan kontras ɔenelitian yang akan dilaksanakan, serta menjelaskan alasan di balik n akan penelitian ini, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun Dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Aryabimo Reksapramudya dkk.2024 Pengaruh Investasi, Belanja Pemerintah dan Ekspor Produk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Medan	- Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu investasi, ekspor dan pertumbuhan ekonomi	- Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda - Hasil dari penelitian yaitu investasi dan belanja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
2.	M Fahmi Zulvan dan Heppy Purbasari. 2024 Pengaruh Investasi, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	- Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu investasi, belanja modal, Pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi	- Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda - Hasil dari penelitian yaitu investasi dan pendapatan asli derah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan belanja modal tidak berpengaruah karena Kabupaten dan Kota yang memiliki belanja modal tinggi maka akan menurunkan nilai pertumbuhan ekonomi
3.	Yanti Yani Ponomban dkk.2020 Pengaruh Investasi Swasta (Pmdn/Pma), Pengeluaran Pemerintah Dan Tenaga Kerja ·hadap Pertumbuhan ɔnomi Kabupaten ıahasa Tenggara	Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu investasi, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi	- Regresi Linier Berganda sedangkan teknik estimasi variabel menggunakan Ordinary Least Square (OLS) - Hasil analisis menunjukan bahwa Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di

Optimized using trial version www.balesio.com

			Kabupaten Minahasa Tenggara. sementara investasi swasta tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa Tenggara dikarenakan Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor pertambangan, yang merupakan penyumbang terbesar investasi di Minahasa Tenggara sejak 2017, menurun karena penerbitan dokumen perizinan pertambangan kini di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
4.	Deva Soni Kurniawan dan Atwal Arifin. 2024 Analisis Pengaruh Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Aloksi Khusus Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Di Jawa Tengah Tahun 2019-2021	Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Aloksi Khusus, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi.	- Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda - Hasil analisis menunjukkan belanja modal dipengaruhi oleh PAD, tetapi tidak dipengaruhi oleh DBH, DAU, atau DAK; interaksi tenggang PAD dan belanja modal dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi tetapi tidak dimoderasi oleh interaksi antara DBH dan belanja modal; dan variabel DBH tidak berdampak pada belanja modal
	ristine Yona Patanduk . 2019	Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu	- Teknik analisis data menggunakan analisis jalur

Optimized using
trial version
www.balesio.com

	Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Belanja Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sulawesi Utara	investasi, belanja pemerintah, tenaga kerja dan PDRB	Path. - Hasil analisis menunjukkan Secara parsial variabel investasi dan tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB di Sulawesi Utara. Kemudian variabel belanja pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Sulawesi Utara
6.	Jenne Kesia Dumais dkk.2022 Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Minahasa Utara	Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu investasi, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi	- Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda - Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel Investasi dan tenaga kerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa Utara kemudian variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
7.	Nanda Safarida dan Susti Rahmawati. 2022 Mengukur Pertumbuhan Ekonomi Aceh Melalui Investasi Dan Tenaga ja: Peran Pendapatan i Daerah Sebagai mediasi	Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu investasi, tenaga kerja, pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi	- Teknik analisis data statistik pada penelitian ini menggunakan path analysis - Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

			Tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Investasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh. Tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh. Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh.
8.	Agus Indriatno Kurniawan dkk. 2017 Pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah serta tenaga kerja terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi	Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu investasi, tenaga kerja, pengeluaran pemerintah pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi	- Teknik analisis data statistik pada penelitian ini menggunakan analisis jalur (path analysis) dengan bantuan program SPSS 24 - Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, serta investasi swasta dan tenaga kerja juga berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Tabel tersebut di atas memberikan gambaran komprehensif tentang perbedaan dan kesinambungan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, serta alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com